

ABSTRAK

M. Afrizal Suleman “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Polairud Polda Maluku Utara)*” Dibimbing Oleh Bapak Muhammad Amin Hanafi dan Ibu Isyana Kurnisari Konoras.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penegakan hukum oleh Polairud Polda Maluku utara pada Tingkat Penyidikan dan untuk mengetahui apa hambatan yang dialami Polairud Polda Maluku dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berlokasi di Polairud Polda Maluku Utara, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan kepustakaan, kemudian setelah data-data terkumpul dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Penyelesaian Penegakan hukum oleh Polairud Polda Maluku Utara pada Tingkat penyidikan yang telah dilimpahkan sesuai dengan Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi, ”Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah. Sedangkan hambatan yang dialami Polairud Polda Maluku Utara dalam melakukan penyidikan tindak pidana perikanan dihadapi Ditpolairud Polda Maluku Utara, yaitu faktor internal seperti kekurangan atau keterbatasan sarana dan fasilitas kemudian kondisi cuaca dan jarak juga menjadi hambatan atau kendala terbesar juga, mengingat lalu lintas atau transportasi kapal yang digunakan untuk melakukan patroli merupakan laut yang bergantung pada keadaan alam.

Kata Kunci: UU No 45 Tahun 2009, dan Tindak Pidana Perikanan

ABSTRAC

M. Afrizal Suleman "*Law Enforcement of Fisheries Crimes at the Investigation Level (Case Study of Polairud Polda North Maluku)*" Supervised by Mr. Muhammad amin Hanafi and Mrs. Isyana Kurnisari Konoras.

This research aims to find out how law enforcement is carried out by the North Maluku Police Polairud at the Investigation Level and to find out what obstacles the North Maluku Police Polairud experience in carrying out investigations into fisheries crimes. This research uses empirical legal research methods located at the North Maluku Police Polairud. The data sources used in this research are primary data sources and secondary data sources. In this research the author used interview, observation and literature data collection methods, then after the data was collected they were analyzed descriptively qualitatively.

Completion of law enforcement by North Maluku Police Polairud at the investigation level which has been delegated in accordance with the criminal provisions regulated in Article 98 of Law of the Republic of Indonesia Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries which reads, "Ship captain Fisheries who do not have a sailing approval letter as intended in Article 42 paragraph (3) will be punished with imprisonment for a maximum of 1 (one) year and a fine of a maximum of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah. Meanwhile, the obstacles experienced by the North Maluku Regional Police's Polairud in carrying out investigations into fisheries crimes are faced by the North Maluku Regional Police's Ditpolairud, namely internal factors such as lack or limitations of means and facilities, then weather conditions and distance are also obstacles. or the biggest obstacle too, considering that the traffic or transportation of ships used to carry out patrols is the sea which depends on natural conditions.

Keywords: Law No. 45 of 2009, and Fisheries Crime